

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha mikro saat ini menjadi salah satu pendukung pergerakan ekonomi Indonesia hal ini dapat terlihat dari bukti nyata bahwa sebagian besar usaha mikro di Indonesia mampu bertahan dalam menghadapi krisis di tengah-tengah krisis global pada tahun 2008 lalu dan pada masa pandemi covid-19 sejak awal 2020 yang masih berdampak hingga saat ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemampuan bertahan usaha mikro di masa krisis ekonomi dan pandemi adalah bukti bahwa sektor usaha mikro merupakan bagian dari sektor usaha yang cukup tangguh. Selain itu menurut kementerian koperasi dan UMKM RI tahun 2021, sektor usaha mikro menyumbang sebagian kontribusi, antara lain yaitu menciptakan investasi nasional, peran usaha mikro terhadap PDB, serta perannya dalam menyerap tenaga kerja baru.

Menurut PP Nomor 7 tahun 2021, usaha mikro, kecil dan menengah atau yang biasa disingkat sebagai UMKM, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Klasifikasi UMKM

Kategori	Klasifikasi UMKM	
	Berdasarkan Modal Usaha UMKM (tidak termasuk tanah dan bangunan)	Berdasarkan hasil penjualan tahunan UMKM
Usaha Mikro	Usaha dengan modal paling banyak 1 Miliar rupiah.	Usaha dengan modal paling banyak 1 Miliar rupiah.

Usaha Kecil	Usaha dengan modal antara 1 Miliar hingga 5 Miliar rupiah	Usaha dengan modal antara 2 Miliar hingga 15 Miliar rupiah
Usaha Menengah	Usaha dengan modal antara 5 Miliar hingga 10 Miliar rupiah	Usaha dengan modal antara 15 Miliar hingga 50 Miliar rupiah

Di Indonesia jumlah usaha mikro terus berkembang dari tahun ke tahun salah satunya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut anggota komisi I DPR RI Sukamta dalam wawancaranya dengan merdeka.com jumlah usaha mikro di DIY tercatat sebanyak 521.021 jumlah itu terdiri dari :

Tabel 1.2

Sebaran Usaha Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta

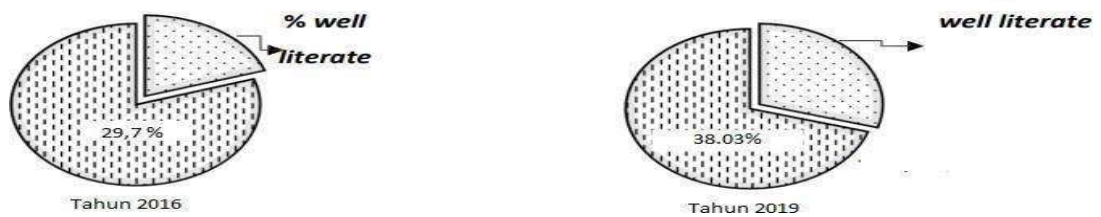
Jumlah Usaha Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta		
No	Kabupaten	Jumlah Usaha Mikro
1	Sleman	140.395
2	Bantul	138.332
3	Kulonprogo	111.665
4	Jogja Kota	66.575
5	Kulonprogo	64.054
Total		521.021

Berdasarkan Tabel 1.2 Jumlah Usaha Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu pada kabupaten Sleman sebanyak 140.395 usaha mikro, kabupaten Bantul sebanyak 138.332 usaha mikro, kabupaten Gunungkidul sebanyak 111.655 usaha mikro, kabupaten Kota Jogja sebanyak 66.575 usaha mikro dan kabupaten Kulonprogo sebanyak 64.054 usaha mikro. Namun

usaha mikro ini tumbuh lambat, dan dalam beberapa situasi, banyak bisnis berskala mikro mengalami kebangkrutan. Hal ini didukung oleh pernyataan sekretaris dinas koperasi DIY dalam harian harianjogja.com, mengatakan bahwa dalam 2 tahun terakhir jumlah usaha mikro di kabupaten Bantul mengalami penyusutan, hal ini disebabkan antara lain oleh bencana pandemi covid-19 serta masih rendahnya kesadaran para pelaku usaha mikro dalam mengelola keuangan yang dimiliki oleh usaha mikro. Pengelolaan keuangan ini sangat dipengaruhi oleh literasi keuangan (*financial literacy*) yang dimiliki oleh seseorang itu sendiri. Literasi keuangan (*financial literacy*) menjadi salah satu pemahaman yang semakin diperlukan untuk menciptakan penduduk yang berkualitas dan memiliki kecerdasan finansial yang baik.

Prihatin & Maruf

Analisis Tingkat Literasi Keuangan pada Pelaku Usaha Mikro



Sumber: Survei Nasional Literasi 2020 OJK

Gambar 1.1

Hasil Survei Tingkat Literasi Keuangan di Indonesia Tahun 2019 dan 2020

Pada gambar 1.1 menunjukkan hasil survei tingkat literasi keuangan di Indonesia yang dilakukan oleh OJK, pada tahun 2020 tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia pada tahun 2016 hanya 29,7%. Sedangkan pada tahun 2019 tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia meningkat menjadi 38,03%. Namun tingkat literasi keuangan di Indonesia masih kalah dengan beberapa negara di ASEAN. Tingkat literasi keuangan di negara Singapura sudah mencapai 96%, Malaysia mencapai 81%, dan Thailand 78% artinya tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Peningkatan literasi keuangan masyarakat Indonesia sangatlah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sehingga peningkatan PDB akan terdongkrak dan kesenjangan ekonomi masyarakat sedikit demi sedikit akan terkikis. Melihat pertumbuhan lembaga keuangan formal dan informal seharusnya masyarakat terutama pelaku usaha dapat memanfaatkan sebagai sarana untuk peningkatan modal usahanya (OJK, 2019).

Pemahaman literasi keuangan sangat penting bagi masyarakat selain berpengaruh bagi keuangan pribadi, literasi keuangan (*financial literacy*) ekonomi pribadi individu, literasi keuangan juga berpengaruh terhadap pengelolaan usaha, bisnis, dan usaha mikro yang dikelolanya. Bagi para pelaku usaha mikro yang tidak memiliki pengetahuan wirausaha, manajemen bisnis dan manajemen pengelolaan keuangan akan mengalami perkembangan yang lambat. Menurut Anggraeni (2016:23) pengelolaan keuangannya usaha mikro yang kurang baik akan menghambat kinerja dan mendapatkan akses pembiayaan. Menurut Dahmen dan Rodriguez (2014) pentingnya pemilik usaha memahami pengetahuan keuangan (literasi keuangan) guna memiliki kinerja perusahaan yang lebih bagus sehingga memungkinkan usaha mikro mengalami pertumbuhan bisnis. Dalam menanggapi permasalahan tersebut, dukungan diberikan Bank Indonesia kepada usaha mikro untuk meningkatkan kualitas perekonomian dengan memberikan *blue print* ekonomi dan keuangan syariah.

Dapat dilihat bahwa di Indonesia sudah banyak lembaga keuangan Islam (syariah) yang telah tumbuh di masyarakat. Literasi keuangan syariah idealnya merupakan solusi dalam melayani konsumen muslim maupun non muslim. Dengan bertambahnya jumlah lembaga keuangan syariah, literasi keuangan syariah berkembang pesat yang menyediakan barang dan jasa keuangan berbasis islam. Namun, keuangan syariah masih mempertahankan pangsa pasar Indonesia yang sedikit, meskipun sebagian besar orang beragama islam, riba, maysir, dan gharar adalah semua praktik keuangan yang diantisipasi untuk ditangani oleh keuangan Islam. Menurut Damayanti (2016) Literasi keuangan mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami

atau mengukur suatu gagasan keuangan, serta kemampuan untuk menangani keuangan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Individu dengan pengetahuan tentang keuangan lebih siap tindakan untuk memutuskan masalah moneter dan kecil kemungkinannya untuk keuangan terganggu oleh penipuan. Salah satu unsur yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian inklusi keuangan dan tingkat literasi adalah penjelasan literasi keuangan masyarakat. Literasi keuangan mengukur kapasitas atau tingkat pemahaman masyarakat tentang bagaimana uang dikelola. Sedangkan Literasi keuangan didefinisikan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) sebagai pengetahuan tentang konsep dan risiko keuangan, serta keterampilan dan kepercayaan diri untuk menggunakan pengetahuan dan pemahaman tersebut guna membuat keputusan keuangan yang bijaksana, memajukan diri sendiri dan kesejahteraan finansial masyarakat, dan terlibat dalam perekonomian (Nurhidayat, 2015). Menggunakan informasi dari survei literasi keuangan berdasarkan statistik OJK untuk syariah yang dirilis pada bulan desember tahun 2020, berikut gambaran data tersebut.

Tabel 1.3

Survei literasi keuangan umum dan syariah Nasional

Tahun	2016	2019	Peningkatan
Literasi Keuangan Umum	29,7 %	38,03 %	8,33 %
Literasi Keuangan Syariah	8,1 %	8,93 %	0,83 %

Sumber: Survei Nasional Literasi 2020 OJK

Berdasarkan tabel 1.3 menunjukkan Menurut data OJK, skor literasi keuangan pada tahun 2016 sebesar 29,7% tetapi menjadi 38,03 persen pada tahun 2019. Data antara tahun 2016 dan menunjukkan peningkatan antara

tahun 2019 terjadi peningkatan literasi keuangan secara keseluruhan sebesar 8,33%. Kemudian, memiliki indeks 8,1% untuk literasi keuangan syariah, dan di tahun 2019 sebesar 8,93% dari total alhasil, dari tahun 2016 hingga 2019, indeks literasi keuangan syariah meningkat sebesar 0,83%. Angka tersebut menunjukkan indeks literasi keuangan OJK tahun 2016 sebesar 29,7%, sedangkan indeks OJK tahun 2019 sebesar 38,03%. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan total literasi keuangan sebesar 8,33% antara data tahun 2016 dan 2019. Kemudian, literasi keuangan terkait syariah memiliki indeks sebesar 8,1%, dan pada tahun 2019 sebesar 8,93%. Alhasil, dari tahun 2016 hingga 2019, indeks literasi keuangan syariah meningkat sebesar 0,83%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman literasi keuangan syariah di Indonesia masih kurang. Di DIY sendiri menurut data yang di publikasikan oleh OJK pada tahun 2020 Di Yogyakarta 9,8% orang melek finansial syariah. 2019 Karena OJK tidak mempublikasikan temuan survei, informasi ini menjadi ketinggalan survei 2022 Tentang literasi keuangan dalam Islam (syariah).

Berdasarkan survei terkait literasi keuangan syariah yang ada di Yogyakarta menunjukkan bahwa tingkat pemahaman literasi keuangan syariah di DIY masih kurang terutama di Kabupaten Bantul. Kurangnya pemahaman usaha mikro terhadap literasi keuangan syariah akan sangat berdampak pada pengembangan usahanya, oleh sebab itu literasi keuangan sudah menjadi hal yang mutlak yang harus dipahami oleh pelaku usaha mikro (Cahyono, 2012). Hal ini bagi penulis menarik untuk meneliti desa Tamantirto, Kasihan, Bantul, karena pelaku mikro di daerah tersebut kurang bisa mengatur keuangan dengan baik sehingga antara uang pribadi dan uang

usaha mereka campurkan hal itu juga yang membuat mereka tidak membuat laporan keuangan. Hal itu yang membuat peneliti akan meneliti di Desa Tamantirto, Kasihan, Bantul. Karena belum ada penelitian lain yang meneliti literasi keuangan ini di Desa Tamantirto, diteliti karena Karena masih jarang ada penelitian yang meneliti tentang literasi keuangan syariah terhadap pengelolaan keuangan usaha mikro di Desa Tamantirto, Kasihan, Bantul. yang merupakan sektor yang potensial yang dapat menciptakan nilai tambah karena didorong tingginya tingkat konsumsi masyarakat.

Menurut penelitian terdahulu oleh Anggraeni (2015) pada obyek penelitian usaha mikro di Depok Kemampuan literasi yang rendah berdampak pada kemampuan pemilik usaha untuk mengelola uang mereka, karena mereka hanya mampu menggunakan alat perekam dan tidak menyimpan catatan pendapatan dan pengeluaran yang memadai. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Ida dan Dwinta (2010) yang menunjukkan bahwa perilaku pengelolaan keuangan seseorang dipengaruhi oleh pengetahuan keuangannya. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Rumbianingrum dan menunjukkan hasil bahwa Literasi keuangan berpengaruh positif pada pengelolaan keuangan usaha mikro dan literasi keuangan.

Berdasarkan fenomena dan uraian latar belakang diatas mendorong peneliti untuk meneliti mengenai literasi keuangan syariah dalam pengelolaan keuangan usaha mikro maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro di Desa Tamantirto, Kasihan, Bantul”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah apakah literasi keuangan berpengaruh pada pengelolaan keuangan usaha mikro di Desa Tamantirto, Kasihan, Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh literasi keuangan syariah terhadap pengelolaan keuangan Usaha Mikro di Desa Tamantirto, Kasihan, Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Dengan demikian, diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat untuk:

1. Usaha Mikro

Sebagai penambahan wawasan bagi pelaku usaha mikro mengenai perlunya literasi keuangan syariah dan bagaimana mengelola keuangan usahanya secara tepat dan akurat.

2. Akademisi

Dapat menjadi bahan kepustakaan yang dapat digunakan sebagai informasi dan sumber ilmu pengetahuan yang bisa digunakan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

3. Peneliti

Memberikan lebih banyak informasi kepada pelaku usaha mikro tentang

pentingnya literasi keuangan syariah dan cara mengelola keuangan dengan benar dan efisien.